

## BAB 2

### KERJASAMA PERUSAHAAN MULTINASIONAL DAN PEMERINTAH INDIA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DOMESTIK

Pemerintah suatu negara tentu memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan yang akan diterapkan pada negaranya. Kebijakan yang diambil ini tidak menutup kemungkinan bahwa negara akan mendapatkan suatu akibat atau dampak. Begitu pula dengan kebijakan yang diberlakukan oleh India dimana pemerintah meminta partisipasi sektor swasta dalam perencanaan, pengembangan dan manajemen proyek sumber daya air domestik. Hal ini tentu memberikan dampak-dampak tersendiri bagi India. Untuk memberikan pemahaman lebih baik terkait kerjasama pengelolaan air antara perusahaan multinasional dan pemerintah India, bab ini akan memberikan penjelasan terkait dampak apa saja yang diterima oleh India akibat adanya kebijakan nasional tahun 2002 mengenai partisipasi sektor swasta dalam pengelolaan sumber daya air domestik.

#### 2.1 Reformasi Ekonomi India Tahun 1991

India sebagai negara berkembang tentu mengalami berbagai peningkatan dalam berbagai sektor, salah satunya adalah perekonomian. Pada periode kepemimpinan perdana Menteri pertama India, Pandit Jawaharlal Nehru tahun 1947 hingga 1964, India memiliki langkah kebijakan yang sama dengan Uni Soviet karena kekaguman pemerintah sosialisnya. Kekaguman ini menjadikan India melakukan gerakan industrialisasi secara massif serta perubahan kebijakan atas sektor publik dan swasta. India juga membuat rencana pengembangan ekonomi melalui kebijakan "*Five Years Plan*"<sup>1</sup> yang dibuat pada tahun 1951 (Ahmed, 2017).

Perkembangan ekonomi India tahun 1951 menghendaki adanya kegiatan ekonomi campuran, birokrasi dan pengaturan ekonomi yang terkendali. Terdapat pula beberapa bentuk perubahan yang terjadi pada masa pra-reformasi ekonomi yaitu dengan adanya reformasi agraria, penghapusan tuan tanah atau yang dalam

---

<sup>1</sup> Five years plan merupakan model perencanaan ekonomi formal yang diadopsi oleh pemerintah India untuk pemanfaatan sumber daya yang seimbang dan efektif (The Print India, 2020).

Bahasa India disebut Zamindari, pembentukan pengaturan sewa, keamanan sewa, penelitian dan penyuluhan pertanian, dibuatnya proyek irigasi, pengadaan pangan, nasionalisasi bank yang digunakan untuk kredit pertanian dan lain sebagainya (Ahmed, 2017). Namun, karena India masih merupakan negara yang baru terbentuk pada masa itu, ternyata segala bentuk kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi negara tidak dapat menghindari India dalam mengalami krisis.

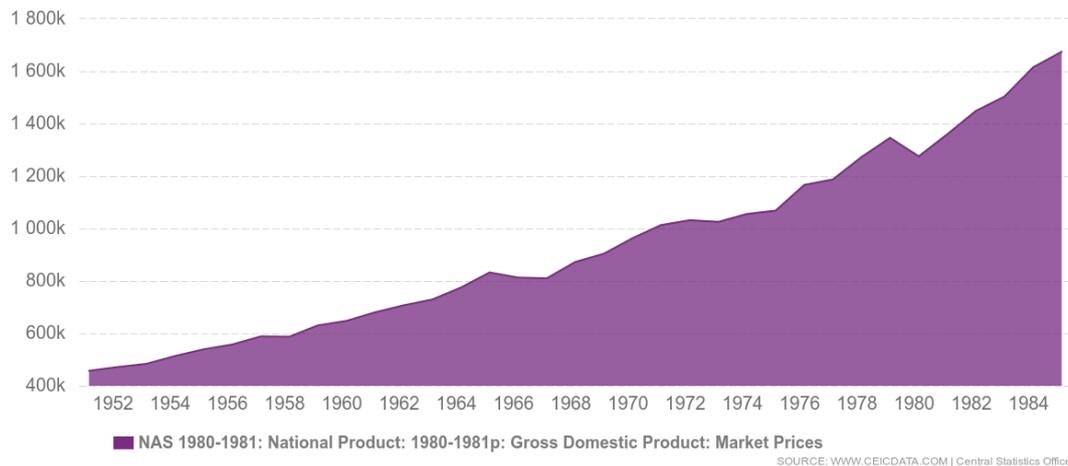
India mengalami krisis keuangan pada sekitar tahun 1980-an. Krisis keuangan ini disebabkan oleh tidak efisiennya manajemen ekonomi India. Meskipun pada periode tersebut India mengalami peningkatan dalam Produk Domestik Bruto<sup>2</sup>, akhir periode tahun 1980-an ini tidak menjadikan perekonomian India menjadi stabil untuk tetap dilaksanakan. Peningkatan PDB ini pun berdasarkan pada dua alasan, yang pertama adalah dengan adanya liberalisasi industri dan perdagangan serta munculnya dana pinjaman yang berasal dari luar negeri. Hal ini kemudian menjadikan pengeluaran pemerintah dalam negeri mengalami peningkatan (Centre for Civil Society India, n.d.). peningkatan Produk Domestik Bruto pada tahun 1951 hingga tahun 1980an dapat dilihat melalui grafik berikut:

---

<sup>2</sup> Indikator yang digunakan untuk mengukur kondisi perekonomian suatu negara yang berupa total jumlah nilai yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha suatu negara (Kompas, 2019).

**Grafik 2. 1**

**Peningkatan Produk Domestik Bruto India periode 1950 hingga 1980-an**



Sumber: (CEIC, India Gross Domestic Product)

Peningkatan PDB India ini disebabkan karena besarnya investasi oleh sektor swasta. Investasi ini menyebabkan adanya kesenjangan antara dua sektor perusahaan di India yaitu sektor publik dan swasta. Dalam mengatasi hal tersebut, pemerintah lalu berinisiatif untuk meminta dana pinjaman luar negeri untuk menjembatani kesenjangan yang cukup besar di sektor ekonomi domestiknya. Dana pinjaman ini tentu memiliki kontribusi yang baik dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi India pada periode tersebut, namun, semakin banyaknya dana pinjaman yang dimiliki oleh suatu negara, maka akumulasi utang luar negeri negara tersebut tentu juga akan semakin cepat meningkat. Sesuai data yang ditulis oleh Centre for Civil Society (CSS), utang luar negeri India meloncat jauh yang awalnya sejumlah 20,6 miliar dolar Amerika pada awal tahun 1980 menjadi 64,4 miliar dolar Amerika pada akhir periode tersebut.

Kondisi ekonomi India pada tahun 1980an dapat diperjelas menjadi lima kategori. Yang pertama adalah perluasan daftar *Open General License List* (OGL) yang berarti pengurangan tarif impor atas barang yang terdaftar dalam OGL. Karena munculnya hal tersebut, maka banyak barang yang semakin dipermudah untuk masuk ke India tanpa harus membayar tarif impor yang besar secara berangsur-angsur setiap tahun. Hal kedua yaitu penurunan pangsa impor dengan

adanya hak monopoli pemerintah atas impor barang-barang tertentu<sup>3</sup>. Barang impor yang masuk ke India antara tahun 1980 hingga 1981 dan 1986 hingga 1987 mengalami penurunan yang awalnya 67 persen menjadi 27 persen. Hal ini terjadi karena tiga alasan: (1) meningkatnya produksi minyak, minyak bumi dan pelumas domestik, (2) keberhasilan *Green Revolution* yang menyebabkan India memberhentikan impor biji-bijian dan (3) dekanalisasi barang yang membuat impor mesin dan barang mentah oleh pengusaha. Kategori ketiga dari kondisi ekonomi India pada tahun 1980 an adalah dengan memperkenalkan dan memperluas insentif ekspor. Pemerintah membuat *replenishment license* yang digunakan oleh eksportir untuk mendagangkan barang jualnya secara bebas di pasar. Keempat adalah pelanggaran kontrol industri dan yang terakhir adalah menetapkan nilai tukar untuk mengurangi bias antara barang yang diperdagangkan dan barang yang tidak diperdagangkan (Panagariya, n.d.). Periode ini merupakan bentuk nyata dari bagaimana pemerintah mengatasi kesenjangan ekonomi dimana pemerintah kemudian melaksanakan berbagai kebijakan dan menghasilkan sumber dana melalui perpajakan, menjalankan sektor publik hingga meminjam dana untuk menutup defisit negara dari bank, masyarakat, negara luar hingga lembaga keuangan internasional.

Tindakan pemerintah India dalam melakukan pinjaman kepada berbagai sektor membuat India memiliki pengeluaran yang besar untuk menutupi pinjaman yang terus menerus terjadi. Pemerintah mengalami krisis dimana pertumbuhan impor kemudian meningkat tanpa mengimbangi pertumbuhan ekspor. Kejadian ini membuat India tidak mendapatkan bantuan baik dari dalam hingga luar negeri. India kemudian mencoba untuk mendekati lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional untuk meminta pinjaman sebesar 7 milyar dolar Amerika. Lembaga-lembaga ini kemudian memberikan pinjaman dengan syarat India diharapkan dapat meliberalisasi dan meningkatkan ekonominya menjadi lebih terbuka dengan menghapuskan pembatasan sektor swasta,

---

<sup>3</sup> Pengertian dari *canalization* berdasarkan pada tulisan Arvind Panagariya di dalam artikel Centre for Civil Society India (CSS, n.d.).

mengurangi peran pemerintah dalam area perekonomian dan penghapusan pembatasan perdagangan antara India dan negara lainnya (The National Council of Educational Research and Training, 2006).

Kejadian krisis ekonomi India pada tahun 1980 an hingga awal 1990an membuat Perdana Menteri Narasimha Rao melihat peluang untuk melakukan reformasi ekonomi secara masif. Langkah pertama yang dilakukan oleh Rao adalah dengan mengangkat seorang ekonom, Manmohan Singh untuk berada di dalam kabinet sebagai Menteri Keuangan dan memberikan dukungan penuh untuk mengubah dan mengembangkan penerapan reformasi ekonomi (Wadhva). Semenjak dipimpin oleh Narasimha Rao, ekonomi India menjadi lebih stabil dengan adanya rangkaian kebijakan untuk memulai liberalisasi dan privatisasi ekonomi India. Reformasi ini membebaskan India dari banyak rintangan birokrasi dan memberikan lapangan bagi pertumbuhan ekonomi yang kuat (Quartz India, 2016).

Dalam masa reformasi ekonomi, India mengalami beberapa keterlambatan pada pertengahan tahun 1991. Namun, hal ini tidak memberhentikan masuknya arus investasi asing masuk ke dalam negara. Semenjak tahun 1991 hingga tahun 2007, India telah mendapatkan investasi asing sebesar 65.8 miliar dolar Amerika. Pemasukan investasi asing ini sebagian disebabkan oleh investasi perusahaan asing seperti Walmart, Toyota dan Kohlberg Kravis Roberts & Co. yang menginvestasikan dana sebesar 900 juta dolar Amerika kepada Flextronic Software Systems Ltd. Hal ini dilakukan sebagai bentuk perusahaan asing untuk memperluas kehadirannya di negara tujuannya (Belhoste & Grasset, 2008). Tabel dibawah ini merupakan 10 negara dengan arus masuk ekuitas investasi asing terbesar pada periode 2000 hingga 2018 di India.

**Tabel 2. 1**

**10 Negara dengan Arus Masuk Investasi Asing Terbesar di India**

**(periode April 2000 hingga Desember 2018)**

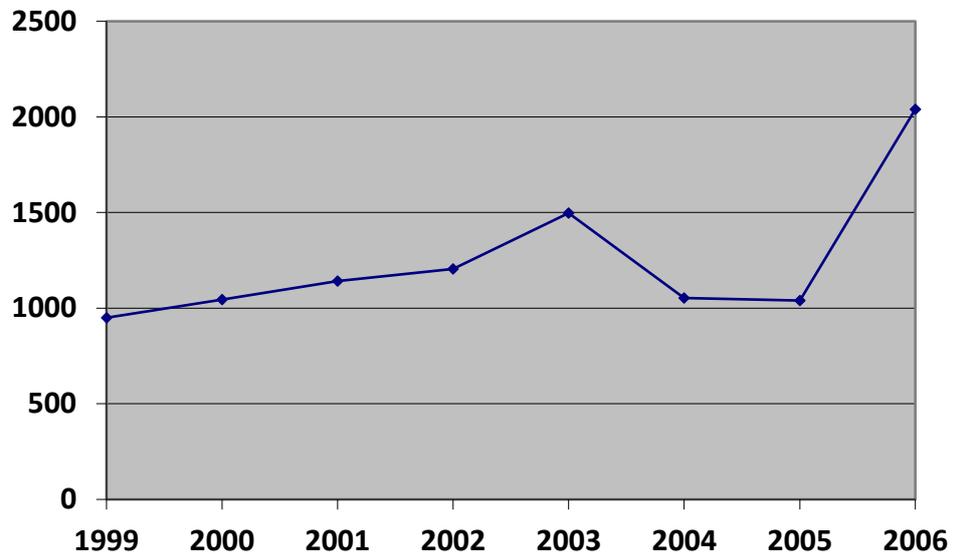
<b>No.</b>	<b>Negara</b>	<b>Jumlah Arus Investasi Asing (dengan juta \$ Amerika)</b>	<b>Persentase</b>
1.	Mauritius	132.408,32	32,36
2.	Singapura	79.746,67	19,49
3.	Jepang	29.519,14	7,21
4.	Britania Raya	26.494,00	6,48
5.	Belanda	26.432,77	6,46
6.	Amerika Serikat	24.759,41	6,05
7.	Jerman	11.419,91	2,79
8.	Cyprus	9.861,07	2,41
9.	Perancis	6.592,53	1,61
10.	Uni Emirat Arab	6.053,83	1,48
	Total	353.287,65	

Sumber: (Department for Promotion of Industry and Internal Trade, 2008)

Semenjak liberalisasi ekonomi, angka peningkatan perusahaan asing di India semakin meningkat yang awalnya hanya berjumlah 950 perusahaan pada tahun 1999 menjadi hingga 2040 perusahaan pada tahun 2006 seperti grafik dibawah ini.

**Grafik 2. 2**

**Pertumbuhan Perusahaan Asing di India (periode 1999 hingga 2006)**



Sumber: (Ministry of Corporate Affairs, Annual Report 2006)

Pada tahun 2004, perusahaan- perusahaan asing yang datang untuk menjalankan bisnisnya di India memiliki fokus utama hanya di daerah yang memiliki prospek pembangunan yang baik seperti New Delhi sebanyak 44 persen, Maharashtra atau Mumbai sebanyak 27 persen, Karnataka atau Bangalore sebanyak 7,7 persen, Bengali Barat atau Kalkuta sebanyak 5,8 persen dan Tamil Nadu atau Chennai sebanyak 5,7 persen (Belhoste & Grasset, 2008).

India dengan mata uangnya, *Rupee*, tidak memiliki konvertibilitas yang penuh. Maka dengan itu, India memiliki peraturan yang mengatur investasi asingnya sendiri. Bagi perusahaan asing yang berinvestasi di India diwajibkan untuk memenuhi peraturan yang mengatur investasi asing yang berada dibawah FEMA. Investasi asing yang masuk ke India dapat dibedakan menjadi dua kategori, kategori pertama adalah investasi asing yang tidak memerlukan izin pemerintah sebelumnya. Investasi ini diberikan izin tanpa meminta persetujuan selama hal tersebut masih berada dalam batas sektoral yang ditetapkan dalam kebijakan yang

mengatur tentang FDI ke India. Sektor yang dapat melakukan hal ini adalah antara lain sektor yang bekerja di bidang: (1) Agrikultur, (2) pertambangan logam, biji logam, batubara dan lignit, (3) sektor manufaktur, (4) industri pertahanan, (5) layanan penyiaran (TV kabel), (6) bandara, (7) pengembangan konstruksi, (8) infrastruktur rel kereta api, (9) perdagangan, termasuk bisnis *e-commerce*, (10) toko bebas bea cukai dan lain sebagainya. Kategori kedua adalah investasi yang wajib harus mendapatkan izin pemerintah sebelumnya. Proposal untuk investasi ini harus diberikan dan akan dipertimbangkan oleh kementerian administrasinya masing-masing. Sektor investasi yang harus melalui jalur persetujuan pemerintah antara lain meliputi: (1) penambangan dan pemisahan mineral yang mengandung titanium, (2) perdagangan baik *online* maupun *offline* yang berhubungan dengan produk makanan yang diproduksi di India, (3) penerbitan jurnal dan majalah ilmiah dan teknis, (4) media cetak asing yang menerbitkan cetakan edisi India yang berhubungan dengan informasi baru dan terkini, (5) perdagangan ritel multi merek, (6) perbankan sektor publik, (7) pendirian dan pengoperasian satelit, dan lain sebagainya (Luthra & Koshy, 2017).

India merupakan negara yang dapat dikatakan protektif dalam segala kebijakan ekonominya terutama di bidang agrikultur dan industri teknologi berskala kecil. Namun, setelah adanya liberalisasi ekonomi, India mulai memperlihatkan sikap ketersediaannya untuk memberikan kesempatan kepada perusahaan asing. Sejarah dan budaya India yang sangat kental hingga saat ini mampu memberikan dampak pada kerjasama antara pemerintah dan perusahaan multinasional asing yang harus secara terus menerus memperjuangkan *stereotypes* atas pekerja yang akan mulai bekerja didalam negara tersebut.

## **2.2 Kerjasama Pemerintah dan Perusahaan Multinasional di India**

Liberalisasi ekonomi India menjadikan adanya perubahan- perubahan baik undang- undang serta kebijakan domestik kepada investor atau perusahaan multinasional asing yang akan masuk dan menjalankan operasi di India.

Dalam data yang disediakan oleh organisasi Alliance Experts, India merupakan negara importir komersial terbesar ke sembilan dengan perkembangan

potensial di sektor manufaktur, keuangan (*banking*), teknologi informasi, perumahan, industri retail, dan jasa pariwisata. India pada tahun 2016 mendapatkan pemasukan PDB melalui sektor manufaktur hanya sebesar 17 persen. Apabila dibandingkan dengan sektor jasa yang berjumlah sebesar 53 persen jelas terdapat kesenjangan yang begitu jelas. Turunnya PDB pada sektor manufaktur disebabkan oleh rendahnya tingkat infrastruktur dan konektivitas sehingga perusahaan kemudian lebih memberikan fokus utama pemberian investasi di sektor yang ringan aset yaitu sektor layanan publik atau bidang *services* (Alliance Experts, n.d.).

Investasi asing di India diatur melalui *Foreign Exchange Management Act* atau FEMA<sup>4</sup> yang dibuat pada tahun 1999. Alasan pembuatan FEMA oleh pemerintahan India adalah untuk mendorong pembayaran eksternal dan perdagangan lintas perbatasan di India yang dikenal sebagai Undang-Undang Manajemen Valuta Asing. FEMA diformulasikan untuk mengisi celah dari *act* sebelumnya yaitu FERA (*Foreign Exchange Regulation Act*)<sup>5</sup> dan karenanya beberapa reformasi ekonomi diperkenalkan di bawah undang-undang FEMA (cleartax, 2020). Beberapa tujuan FERA adalah antara lain untuk mengatur transaksi valuta asing dan sekuritas, mengatur transaksi yang secara tidak langsung mempengaruhi valuta asing, mengatur impor dan ekspor mata uang, mengatur perusahaan asing, mengatur pekerjaan warga negara asing, dan lain sebagainya (Jiwaji University, 2020). Karena adanya beberapa perubahan kebijakan ekonomi India pasca liberalisasi, pemerintah kemudian mengusulkan untuk memperkenalkan amandemen komprehensif di FERA. Namun, karena FERA dinilai sebagai undang-undang yang terlalu ketat karena mayoritasnya adalah pembuatan regulasi, pemerintah kemudian memodifikasi Undang-Undang tentang pengaturan investasi asing India untuk menjadi lebih fleksibel dengan diciptakannya FEMA atau *Foreign Exchange Management Act*. FEMA berlaku

---

<sup>4</sup> Pembentukan FEMA memiliki tujuan untuk memfasilitasi perdagangan dan pembayaran eksternal serta mempromosikan pengembangan dan pemeliharaan pasar valuta asing yang teratur di India (Ministry of Law and Justice India, 1999).

<sup>5</sup> FERA pada awalnya dibentuk oleh pemerintah India untuk menangani undang-undang yang berhubungan dengan devisa negara. FEMA juga berperan dalam mengendalikan dan mengelola investasi asing di India (Jiwaji University, 2020).

untuk semua cabang, kantor dan badan-badan dari luar negara yang dioperasikan di dalam India.

India sebagai negara yang memiliki perkembangan ekonomi yang cepat membuka kesempatan bagi perusahaan asing untuk melebarkan bisnisnya. Cara-cara yang dapat dipilih oleh sebuah perusahaan adalah antara lain dengan melakukan *Joint Venture* atau perusahaan patungan dengan perusahaan asli India. Hal ini paling sering ditemukan di dunia bisnis di India dimana terdapat dua atau lebih perusahaan yang memiliki objektif yang sama bekerja dalam satu tempat yang sama pula. Cara kedua adalah pembangunan anak perusahaan di dalam India (*Wholly Owned Subsidiary Company*). Hal ini dapat dilakukan dengan membentuk perseroan terbatas swasta atau perseroan terbatas publik. Opsi ini mampu menjadikan perusahaan mendapat perlakuan sebagai perusahaan domestik dan memenuhi syarat untuk segala kebijakan perekonomian yang berada di India atau dengan kata lain, perusahaan ini mendapat perlakuan yang sama dengan perusahaan lain baik perusahaan tersebut berasal asli dari India atau dari luar negeri. Selanjutnya, perusahaan dapat melakukan pendirian kantor penghubung atau *Liaison Office*. Kantor penghubung ini memiliki peran sebagai saluran komunikasi antara kantor pusat yang berada di luar India dengan pihak-pihak yang bekerja di India. Dalam pengoperasiannya, *Liaison Office* atau LO tidak dapat melakukan kegiatan komersial dan tidak memperoleh penghasilan apapun di India. Peran utama dari LO adalah untuk mengumpulkan informasi tentang kemungkinan peluang pasar dan juga mempromosikan ekspor impor baik dari maupun ke India. Cara keempat yaitu dengan mendirikan kantor Proyek atau *Project Office* yang merupakan tempat sementara bagi perusahaan asing untuk melaksanakan proyek tertentu di India. Kantor proyek memiliki batasan kerja sesuai dengan kontrak yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan. Dalam menjalankan bisnisnya, perusahaan harus mengikuti beberapa kondisi yaitu dengan meyakinkan bahwa proyek harus dibiayai secara langsung oleh *inward remittance* dari kantor pusatnya yang berada diluar India, proyek didanai oleh lembaga pembiayaan internasional bilateral atau multilateral, proyek harus dijalankan oleh otoritas yang sesuai, dan perusahaan yang berhasil masuk dan membangun kantor proyek di India sudah

mendapat pinjaman berjangka oleh lembaga keuangan publik atau bank di India dengan maksud sebagai sumber biaya dari proyek yang dijalankan. Kelima adalah dengan membangun kantor Cabang atau *Branch Office* yang merupakan perpanjangan tangan dari perusahaan asing yang bergerak di bidang perdagangan atau manufaktur. Pembangunan kantor cabang di India harus sesuai dengan persetujuan khusus RBI<sup>6</sup> dan dapat melakukan kegiatan yang lebih leluasa yaitu dengan diperbolehkannya melakukan ekspor dan impor barang, memberikan jasa profesional atau konsultasi, mempromosikan kerjasama teknis dan keuangan antara perusahaan India dan perusahaan induknya, bertindak sebagai agen untuk membantu distribusi dan produksi perusahaan induk, dan juga memberikan dukungan teknis untuk produk yang dipasok oleh perusahaan asing. Dan cara terakhir yang dapat perusahaan lakukan adalah dengan membuat kemitraan Tanggung Jawab Terbatas tau *Limited Liability Partnerships (LLP)* yang digunakan bagi entitas asing untuk mengembangkan bisnisnya di India baik dari usaha kecil hingga usaha yang besar.

Perusahaan asing yang menjalankan bisnisnya di India bertanggung jawab langsung dan harus mematuhi beberapa kebijakan yang diberikan oleh pemerintah yaitu *Companies Act* yang merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan perseroan terbatas, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang yang berdasar pada Hukum Lingkungan dan perusahaan juga harus menjalankan persyaratan kepatuhan berdasarkan Undang-Undang Valuta Asing (Astrea Legal Associates).

### **2.3 Perusahaan Asing di India**

Munculnya perusahaan asing di suatu negara tentu diawali dengan pemahaman akan budaya bisnis, manajemen, dan daya tarik untuk investasi asing di negara yang dituju. Sama halnya dengan perusahaan-perusahaan asing di India yang melihat peningkatan arus masuk investasi asing di India sebagai indikator

---

<sup>6</sup> RBI adalah Reserve Bank of India yang dalam hal ini memiliki fungsi sebagai *Foreign Exchange Management* (Reserve Bank of India).

penting bagi perusahaan multinasional asing. Ekonomi India dapat dilihat sekilas dari tabel dibawah ini.

**Tabel 2. 2**  
**Sekilas Ekonomi India (2002)**

Luas Area	3.290.000 m2
Populasi	1,6 miliar jiwa (estimasi tahun 2004)
Rata-rata pertumbuhan PDB riil	6.0% (rata-rata semenjak tahun 1990)
PDB per kapita	\$440 Amerika (2001-2002)
Cadangan devisa negara	\$68 Miliar Amerika (periode Desember 2002)
Ekspor	Tekstil, barang unggulan, permata atau perhiasan, bahan kimia produk makanan olahan, barang teknik, <i>software</i>
Impor	Minyak mentah, mesin, bahan kimia dan pupuk

Sumber: (Foreign Multinationals in India: Adapting to India's Work Culture and Management Practices, 2006)

Dengan banyaknya jumlah populasi India yang mencapai 1,6 miliar jiwa, hal ini menjadi kesempatan besar bagi perusahaan untuk melebarkan bisnisnya. India menawarkan kemudahan berbisnis, menjanjikan stabilitas dan prediktabilitas dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan investor dan mempromosikan investasi asing yang lebih besar di bawah pemerintahan Narendra Modi. Kemudahan berbisnis yang ditawarkan pemerintah India adalah antara lain dengan membuat situs web untuk investor yang berisi tentang dukungan utama dan *FAQ*<sup>7</sup> bagi perusahaan asing yang berminat untuk melebarkan bisnisnya di India. Selain

---

<sup>7</sup> *FAQ : Frequently Asked Questions.*

itu, pemerintah juga memperkenalkan formulir online SPICe atau INC 32<sup>8</sup> yang dapat disetujui dengan waktu kurang lebih 2 hari (Luthra & Koshy, 2017). Hingga akhir tahun 2014, telah terdaftar sebanyak 2.000 perusahaan asing yang bergerak di 20 sektor kerja dengan 99 negara yang bekerja didalamnya. Sektor kerja yang dimaksud dapat diperjelas dengan tabel setelah ini.

**Tabel 2. 3**  
**Aktivitas Ekonomi Perusahaan Asing di India (*Sector Wise*)**  
**(periode akhir 2014)**

No.	Sektor	Jumlah Total Perusahaan Asing yang Teregistrasi	Jumlah Perusahaan Aktif
1.	Pertanian dan kegiatan terkait	2	1
2	Layanan Bisnis	728	610
3.	Komunitas, layanan pribadi dan sosial	1430	992
4.	Konstruksi	62	50
5.	Perusahaan listik, gas dan air	19	16
6.	Keuangan	92	83
7.	Asuransi	15	7
8.	Manufaktur ( <i>food and beverages</i> )	10	6
9.	Manufaktur (kulit)	6	4
10.	Manufaktur (mesin dan peralatan)	108	79

<sup>8</sup> SPICe : *Simplified Proforma for Incorporating a Company Electronically* atau INC 32 adalah formulir online yang berkaitan dengan pendaftaran atau reservasi nama, pendirian perusahaan baru di India (Cleartax, 2021).

11.	Manufaktur (logam& bahan kimia)	67	41
12.	Manufaktur (produk kertas, penerbitan, pencetakan dan reproduksi media rekaman)	4	2
13.	Manufaktur (tekstil)	18	12
14.	Manufaktur (produk kayu)	3	2
15.	Manufaktur (lainnya)	9	9
16.	Pertambangan dan penggalian	64	59
17.	<i>Real Estate</i> dan persewaan	3	2
18.	Perdagangan	64	55
19.	Pengangkutan, penyimpanan dan komunikasi	56	45
<b>TOTAL</b>		<b>2.760</b>	<b>2.081</b>

Sumber: (Data dari Ministry of Corporate Affairs, Government of India. Diolah oleh penulis)

Pada periode tahun 2019 hingga tahun 2020, terdapat sebanyak 124 perusahaan asing baru yang mendaftarkan diri untuk memulai bisnisnya di India. Hal ini menjadikan jumlah total perusahaan asing yang masuk ke India semenjak tahun 2018 menjadi sebanyak 242 perusahaan (Economic Times, 2021).

Setiap perusahaan yang hendak masuk dan melaksanakan bisnisnya di India diwajibkan untuk mengikuti beberapa Undang-Undang yang berkaitan dengan jalannya bisnis di India. Undang-Undang tersebut merupakan yang pertama, *Companies Act* tahun 2013. *Companies Act* tahun 2013 milik India mengatur pembentukan dan fungsi korporasi atau perusahaan di India. Undang-Undang *Companies Act* ini sudah disahkan semenjak tahun 1956 dan mengalami perubahan beberapa kali, hingga pada tahun 2013, pada pasal 135 UU 2013, India menjadi

negara pertama yang mewajibkan perusahaan untuk melakukan CSR<sup>9</sup> secara hukum. Sorotan utama yang terdapat pada Undang-Undang ini adalah antara lain membicarakan tentang jumlah maksimum pemegang saham untuk perusahaan swasta sebanyak 200 (dari yang awalnya hanya berjumlah 50), diperkenalkannya konsep *One-Person Company*<sup>10</sup>, dibuatnya Pengadilan Banding Hukum Perusahaan dan Pengadilan Hukum Perusahaan dan yang terakhir adalah mewajibkan perusahaan untuk melakukan program CSR-nya untuk meningkatkan kesejahteraan dan juga memberi dampak positif kepada masyarakat yang berada dalam lingkungan sekitar perusahaan (BYJUS, n.d.). *Companies Act* India tahun 2013 merupakan pembaruan Undang- Undang yang berhubungan dengan korporasi dan perusahaan di India. Undang- Undang ini sudah disahkan oleh Lok Sabha<sup>11</sup> pada tanggal 18 Desember 2012 dan dilanjutkan pengesahannya oleh Rajya Sabha<sup>12</sup> pada tanggal 8 Agustus 2013. Undang- Undang ini kemudian menerima persetujuan Presiden pada tanggal 29 Agustus 2013 (Bryan Cave, 2013).

Undang- Undang kedua adalah *Competition Act*. *Competition Act* India merupakan Undang- Undang yang diberlakukan guna memperhatikan perkembangan ekonomi negara untuk pembentukan komisi untuk mencegah praktik yang berdampak buruk pada persaingan bisnis. Undang- Undang ini melarang adanya perjanjian anti-persaingan, penyalahgunaan posisi dominan oleh perusahaan dan mengatur kombinasi bisnis seperti akuisisi, perolehan kendali dan *M&A*<sup>13</sup> yang mungkin menyebabkan adanya kerugian cukup besar pada ekonomi India (Competition Commission of India, 2002). Sebelum Undang- Undang Kompetisi India diberlakukan, tidak ada ketentuan di India yang mengatur persaingan atau melarang perjanjian anti persaingan dan dalam menjalani tugasnya,

---

<sup>9</sup> CSR atau *Corporate Social Responsibility* adalah konsep manajemen dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dan lingkungan dalam operasi bisnisnya (UNIDO, n.d.).

<sup>10</sup> *One Person Company* atau OPC merupakan perusahaan yang memiliki persyaratan kepatuhan yang lebih rendah daripada perusahaan swasta. OPC dapat dijalankan hanya dengan satu anggota dan satu Direktur berdasarkan *Companies Act* India tahun 2013 (India Filings, n.d.).

<sup>11</sup> Lok Sabha merupakan Majelis Parlemen Rendah di India (Bryan Cave, 2013)

<sup>12</sup> Majelis Parlemen Tinggi India (ibid).

<sup>13</sup> *Merger and Acquisitions* adalah transaksi dimana kepemilikan perusahaan atau unit operasinya dialihkan ke entitas lain (Gartner Glossary, n.d.).

Undang- Undang ini didasarkan pada tiga pilar hukum persaingan yaitu; Komisi Persaingan India (CCI), Pengadilan Banding Persaingan (COMPAT), dan juga Kebijakan Persaingan Nasional (NCP). Tujuan utama diberlakukannya Undang- Undang ini adalah untuk memastikan bahwa persaingan pasar dapat bekerja secara efektif dan konsumen mendapatkan akses luas ke berbagai produk yang lebih luas dengan harga yang kompetitif (Khatabook, n.d.).

Undang- Undang ketiga yang harus dipatuhi oleh perusahaan adalah Undang- Undang Pajak Penghasilan yang dibuat untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh seseorang untuk pemerintah. Undang- Undang ini terdiri dari beberapa bab yang mencakup ketentuan yang berkaitan dengan penentuan status tempat tinggal seseorang di India, pengecualian, perhitungan total pendapatan, pengurangan, penentuan kewajiban pajak, pengajuan pengembalian pajak penghasilan, hukuman, prosedur penilaian dan lain sebagainya (Taxmann, 2022). Keempat adalah Undang- Undang Kontrak India yang pada dasarnya berisikan tentang prinsip-prinsip umum yang berkaitan dengan pembentukan dan keberlakuan kontrak. Seperti dikatakan pada Bagian 10 Undang-Undang Kontrak India yang menyatakan bahwa perjanjian dapat membentuk suatu kontrak. Hal itu dapat diperjelas dengan isi dari Bagian 10 yang berbunyi:

“Semua perjanjian adalah kontak jika dibuat dengan persetujuan bebas dari pihak-pihak yang berkompeten untuk membuat kontrak. Untuk suatu pertimbangan yang sah dan dengan objek yang sah, dan dengan ini tidak secara tegas dinyatakan batal. Tidak ada yang akan mempengaruhi hukum apa pun yang berlaku di India, dan dengan ini tidak secara tegas dicabut, di mana kontrak apa pun harus dibuat secara tertulis atau di hadapan saksi, atau hukum apa pun yang berkaitan dengan pendaftaran dokumen.”

Sumber: (Government of India, 1987. Disunting oleh penulis)

Selain perjanjian, terdapat beberapa ketentuan khusus yang berkaitan dengan kontrak di dalam Undang- Undang ini seperti jaminan, janji, ganti rugi, jaminan dan juga agen. Hal ini menciptakan adanya hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh para pihak yang saling berkontrak dan keduanya ini bersifat korelatif

yang bermaksud bahwa jika ada suatu pihak yang menolak untuk menghormati kewajiban pihak lain maka pihak tersebut dapat meminta haknya karena merasa dirugikan (Umeshchandra College Journal, 2022).

Undang- Undang kelima yaitu *The FEMA 1999* (Undang-Undang Pengelolaan Valuta Asing India). Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya pada bab ini di poin 2.2, bahwa FEMA merupakan Undang-Undang yang dibuat untuk mengatur investasi asing yang masuk di India. Tujuan utama dibuatnya FEMA adalah antara lain sebagai hukum yang memfasilitasi perdagangan dan pembayaran eksternal dan juga digunakan untuk mempromosikan pengembangan yang teratur dari pasar valuta asing di India. FEMA berisi tentang prosedur, formalitas, dan transaksi di India. Di dalam situs resmi Kedutaan Besar India, FEMA memiliki 12 ketentuan utama<sup>14</sup> yang harus diperhatikan oleh perusahaan.

Keenam adalah Undang- Undang *The SEBI Act. The Securities and Exchange Board of India* atau SEBI dibentuk pada tanggal 12 April 1988 dan ketentuan yang dibuat oleh badan ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 1992. Badan ini memiliki fungsi dasar sebagai pelindung kepentingan investor dalam sekuritas. Selain itu Badan ini juga mempromosikan pengembangan, mengatur pasar, dan juga mengatur hal yang berhubungan dengan sekuritas ekonomi (*The Securities and Exchange Board of India, 1992*). Dan Undang- Undang terakhir adalah *The SCRA Act* Undang- Undang Kontrak Sekuritas India mulai diberlakukan pada tahun 1956 merupakan Undang-Undang pertama yang dibuat di pasar modal India. SCRA

---

<sup>14</sup> 12 Ketentuan Utama FEMA yang harus diperhatikan adalah antara lain: 1) perdagangan valuta asing, 2) penahanan devisa, 3) transaksi rekening terkini, 4) transaksi akun modal, 5) ekspor barang dan jasa, 6) realisasi dan repatriasi devisa, 7) pembebasan dari realisasi dan repatriasi devisa dalam kasus- kasus tertentu, 8) Ketentuan yang berkaitan dengan individual tertentu (individu yang diberi wewenang oleh *Reserve Bank of India* atau RBI untuk berurusan dengan valuta asing), 9) Kekuatan RBI untuk memeriksa individu yang berwenang pada lingkungan investasi asing, 10) Undang-Undang yang berisi kontravensi dan hukuman; 11) Ajudikasi dan banding; 12) direktorat penegakan ketentuan dan lain sebagainya (Indian Embassy of United States of America, n.d.).

ini bertugas untuk mengatur kontrak yang dilaksanakan di pasar sekuritas dan bursa saham India atau SEBI, maka dari itu semua hal yang ditentukan oleh SEBI harus selalu mengikuti syarat dan ketentuan yang diberikan oleh SCRA (Cleartax India, 2022).

#### **2.4 Reformasi Kebijakan Terhadap Perusahaan Multinasional**

Berbagai perubahan kebijakan telah dialami oleh India dalam tujuan untuk memajukan negara dan perekonomiannya dan menyejahterakan masyarakat yang ada didalamnya. Kebijakan ekonomi India yang pada awalnya dipandang bersifat tertutup kemudian mulai mengubah arah dengan adanya liberalisasi ekonomi. Liberalisasi ekonomi ini dilakukan untuk memudahkan pemerintah menjalin kerjasama dengan pemerintah dan perusahaan asing dari negara lain. Selain itu, karena India pernah mengalami krisis keuangan yang parah, kerjasama dengan organisasi internasional dan negara lain juga sangat dibutuhkan.

Liberalisasi ekonomi India memunculkan adanya perubahan Undang-Undang serta kebijakan domestik yang ditujukan kepada investor atau perusahaan multinasional asing yang akan menjalankan bisnisnya di India. Berbagai cara pemerintah lakukan untuk mendapatkan perhatian perusahaan asing untuk berinvestasi di negaranya. Hal tersebut membuahkan hasil dimana pada tahun 2014 terdapat total 2.760 perusahaan asing yang mendaftarkan bisnisnya di India.

Bab selanjutnya akan menjelaskan bagaimana keterbukaan India atas perusahaan multinasional asing berdampak pada masyarakat, terutama dalam bidang pengelolaan sumber daya air.